

Peran Etika Komunikasi Publik Dalam Mencegah Pernyataan Kontroversial Pejabat Publik

Izzuddin Rahmat Zulafa¹ Adi Nugroho Susanto Putro²

Situ Asih³

STAB Negeri Raden Wijaya^{1&2}

Email Korespondensi: izzuddinrz09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika komunikasi publik dalam mencegah pernyataan kontroversial (blunder statement) pejabat publik. Penelitian dilatarbelakangi oleh maraknya pernyataan pejabat yang menimbulkan polemik dan menurunkan kepercayaan publik. Studi ini menggunakan teori etika komunikasi dengan pendekatan kualitatif metode fenomenologi. Subjek penelitian adalah pejabat publik di Kabupaten Wonogiri yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika komunikasi dipahami sebagai praktik reflektif yang melibatkan verifikasi data, pertimbangan dampak sosial, serta penggunaan bahasa yang empatik dan jelas. Blunder tidak hanya disebabkan oleh kesalahan isi pesan, tetapi juga oleh perbedaan interpretasi antara komunikator dan audiens. Selain itu, kecepatan dan ketepatan respons dalam klarifikasi menjadi faktor penting dalam mengelola krisis komunikasi. Dengan demikian, etika komunikasi berperan sebagai mekanisme preventif sekaligus strategis dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial.

Kata Kunci: Etika Komunikasi, Komunikasi Publik, Pernyataan Kesalahan, Pejabat Publik, Kepercayaan Publik

Abstract

This study aims to analyze the role of public communication ethics in preventing controversial statements (blunder statements) made by public officials. The research is motivated by the increasing number of officials' statements that trigger public controversy and reduce public trust. This study applies communication ethics theory using a qualitative phenomenological approach. The research subjects are public officials in Wonogiri Regency, selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The findings reveal that communication ethics

is understood as a reflective practice involving data verification, consideration of social impact, and the use of clear and empathetic language. Blunders are not solely caused by message errors but also by differences in interpretation between communicators and audiences. Additionally, the speed and accuracy of responses in providing clarification play a crucial role in managing communication crises. Therefore, communication ethics functions as both a preventive and strategic mechanism to maintain public trust and social stability.

Keywords: *Communication Ethics, Public Communication, Blunder Statement, Public Officials, Public Trust*

PENDAHULUAN

Komunikasi yang efektif dalam arsitektur sebuah negara demokrasi yaitu, komunikasi publik yang efektif antara pemerintah dan warganya merupakan fondasi esensial yang menopang seluruh struktur pemerintahan. Komunikasi ini bukan sekadar proses transmisi informasi searah, melainkan sebuah dialog berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama, mendorong partisipasi publik, serta membangun dan memelihara kepercayaan (*public trust*). Lembaga pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang valid, menyampaikan informasi secara akurat, efektif, efisien, dan terjangkau, sehingga komunikasi antara pihak pemerintah dengan pemangku kepentingan dapat berjalan sesuai yang diharapkan (Hastrida & Hendriyani, 2023). Kepercayaan publik adalah aset paling vital bagi sebuah pemerintahan yang legitim; tanpanya, kebijakan akan sulit diimplementasikan, legitimasi akan tergerus, dan stabilitas sosial akan terancam. Pejabat publik, memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa informasi kebijakan yang dirumuskan (Rosyalita, 2012). Oleh karena itu, setiap pernyataan yang dikeluarkan memiliki bobot dan implikasi yang sangat besar, berfungsi sebagai cerminan dari kapasitas, integritas, dan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya.

Fungsi ideal dari komunikasi pejabat publik adalah sebagai instrumen pencerahan, klarifikasi, dan persuasi yang bertanggung jawab. Ketika sebuah isu berkembang di masyarakat baik itu krisis kesehatan, gejala ekonomi, maupun kontroversi sosial pernyataan pejabat diharapkan mampu meredakan ketegangan, memberikan informasi yang akurat dan menenangkan, serta menunjukkan bahwa negara hadir dan bekerja untuk mencari solusi. Komunikasi yang ideal ini menuntut adanya perencanaan strategis, pemahaman mendalam terhadap audiens, serta penyampaian pesan yang jernih dan empatik (Nugraha et al., 2022). Dalam konteks ini, komunikasi publik tidak lagi dipandang sebagai aktivitas sampingan, melainkan sebagai kompetensi inti yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang mengemban amanah sebagai pejabat negara. Seni dan ilmu untuk mengelola persepsi,

membangun konsensus, dan memperkuat ikatan sosial antara yang memimpin dan yang dipimpin.

Secara teoretis, komunikasi pemerintahan yang efektif beroperasi dalam sebuah ekosistem dialogis yang sehat, di mana umpan balik dari masyarakat dihargai dan direspons secara konstruktif. Ruang publik menjadi arena pertukaran gagasan yang sehat, bukan medan pertempuran verbal yang dipenuhi amarah dan kecurigaan. Pejabat publik, dengan demikian, tidak hanya bertindak sebagai sumber informasi (informan), tetapi juga sebagai fasilitator dialog dan pendengar aktif atau sebagai komunikator (Hastrida & Hendriyani, 2023). Keberhasilan pejabat publik diukur bukan hanya dari seberapa sering tampil di media, tetapi dari seberapa besar kualitas kepercayaan dan kepuasan publik yang berhasil dibangun melalui interaksi komunikatif tersebut. Inilah standar emas yang seharusnya menjadi tujuan dari setiap praktik komunikasi publik di lingkungan pemerintahan. Hal ini menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif (Kusuma et al., 2024).

Lanskap Komunikasi pada kurun waktu satu tahun terakhir, di Indonesia menunjukkan sebuah kesenjangan yang mengkhawatirkan antara kondisi ideal teoretis dengan realitas praksis yang terjadi di lapangan. Alih-alih menjadi sumber pencerahan dan stabilitas, pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah pejabat publik justru kerap menjadi pemicu kegaduhan, kontroversi, dan kemarahan publik (Oktari et al., 2023). Fenomena yang dikenal luas sebagai *blunder statement* atau pernyataan kontroversial ini semakin sering terjadi, menandakan adanya masalah serius dalam cara pejabat publik berkomunikasi dengan warganya. Pernyataan-pernyataan ini seringkali ditandai dengan pilihan kata yang tidak sensitif, logika yang keliru, data yang tidak akurat, atau bahkan sikap yang meremehkan kecerdasan dan perasaan publik. Fenomena ini telah menjadi sebuah pola yang berulang, bukan lagi sekadar insiden sporadis yang terisolasi.

Realitas ini secara jelas menunjukkan seringnya terjadi fenomena *blunder statement* atau pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pejabat publik di Indonesia saat menanggapi isu yang berkembang di masyarakat. Pernyataan tersebut tidak hanya gagal mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan, tetapi juga seringkali menghasilkan efek bumerang yang memperburuk situasi (Martini & Elsitra, 2022). Di era digital dengan penyebaran informasi yang sangat cepat, sebuah pernyataan *blunder* dapat menjadi viral dalam hitungan menit, memicu krisis komunikasi skala nasional yang sulit untuk dikendalikan (Febriandy, 2024). Kegagalan komunikasi ini pada akhirnya menciptakan disonansi antara narasi yang coba dibangun pemerintah dengan persepsi yang terbentuk di benak masyarakat, yang pada gilirannya melemahkan efektivitas pemerintahan itu sendiri.

Kesenjangan ini menjadi semakin tajam ketika dihadapkan pada ekspektasi publik yang semakin tinggi. Masyarakat modern, yang terdidik dan terhubung secara digital, menuntut standar akuntabilitas dan transparansi

yang lebih tinggi dari para pemimpinnya. Publik tidak lagi dapat menerima pernyataan yang bersifat dogmatis, simplistis, atau tidak berdasar (Rahmanto, 2022). Publik kini memiliki kapasitas untuk melakukan verifikasi fakta secara mandiri dan menyuarkan kritik secara masif melalui berbagai *platform* media sosial. Ketika pejabat publik gagal beradaptasi dengan realitas baru ini dan terus menggunakan pola komunikasi lama yang bersifat *patronizing* (menggurui), maka jurang antara pemerintah dan masyarakat pun akan semakin melebar, menciptakan sebuah siklus ketidakpercayaan yang terus-menerus.

Dampak dari fenomena *blunder statement* ini sangat nyata dan merusak. Fenomena pemberitaan kontroversial di Wonogiri mencuat setelah rencana Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang akan menarik pajak sebesar 10 persen bagi pelaku UMKM makanan dan minuman dengan omzet minimal Rp5 juta diumumkan ke publik. Kebijakan ini menuai banyak penolakan dan kritik dari masyarakat, karena dinilai tidak tepat diterapkan pada kondisi ekonomi saat ini. Pasalnya, belum lama ini terjadi kebakaran besar di Pasar Kota Wonogiri yang merupakan jantung perekonomian daerah, sehingga banyak pelaku usaha masih berjuang memulihkan usaha dan pendapatannya. Dalam situasi tersebut, publik menilai kebijakan kenaikan pajak justru berpotensi menambah beban UMKM dan menghambat pemulihan ekonomi lokal, sehingga dianggap kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Wonogiri secara menyeluruh (Praditia, 2025).

Contoh lain dari fenomena ini yang memicu kemarahan publik adalah pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Menanggapi adanya kritik dan seruan publik untuk membubarkan DPR RI akibat kinerja yang dinilai buruk, Sahroni merespons dengan kalimat yang sangat kontroversial. Sahroni menyatakan bahwa "orang yang bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia" (Arif, 2025). Pernyataan ini sontak memicu badai kritik di media sosial. Alih-alih merespons kritik dengan data kinerja atau dialog yang konstruktif, pilihan diksi "tolol sedunia" dianggap sebagai bentuk arogansi, anti-kritik, dan penghinaan terhadap aspirasi masyarakat (Wiratama, 2022).

Kasus Sahroni ini secara jelas mencerminkan adanya kegagalan pejabat publik dalam membangun *ethos* (kredibilitas dan karakter moral) yang kuat sebagai komunikator di mata publik. Sebagai wakil rakyat, *ethos* seorang anggota DPR seharusnya dibangun di atas sikap mau mendengarkan dan menghargai kritik. Dengan menggunakan diksi yang merendahkan, *ethos* tersebut runtuh seketika, dan pesan apa pun yang berusaha disampaikan sesudahnya menjadi tidak kredibel. Ini adalah contoh bagaimana kegagalan etika dalam merespons kritik justru memperburuk citra institusi yang diwakilinya (Ernasari & Hadiati, 2024).

Contoh lain yang menunjukkan kegagalan komunikasi dalam merespons isu krusial datang dari Bupati Pati, Sudewo. Saat menghadapi gelombang protes masyarakat yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) hingga 250%, Bupati Sudewo mengeluarkan pernyataan yang dinilai menantang warganya sendiri. Bapak Sudewo mengatakan, "Jangankan 5 ribu orang yang demo, 50 ribu orang yang demo pun tidak akan membatalkan kebijakan PBB" (DetikJateng, 2025). Pernyataan ini, yang belakangan diklarifikasi sebagai bukan sebuah tantangan, terlanjur dipersepsikan oleh publik sebagai bentuk keangkuhan kekuasaan dan sikap yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya.

Dampak dari pernyataan tersebut sangat bisa diprediksi dan menjadi contoh sempurna dari terjadinya krisis kepercayaan publik (*public trust crisis*) dan munculnya reaksi negatif dari masyarakat. Pernyataan yang tidak empatik itu justru menyulut emosi massa yang lebih besar, memicu demonstrasi yang lebih masif, dan bahkan berujung pada kericuhan. Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo tergerus tajam, bukan hanya karena kebijakannya, tetapi diperparah oleh gaya komunikasi publiknya yang konfrontatif dan gagal menunjukkan empati terhadap beban ekonomi yang dihadapi warganya (Kusnadi et al., 2023).

Fenomena serupa yang menunjukkan rendahnya sensitivitas terjadi pada pernyataan Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Dalam sebuah kesempatan, Menag menyatakan bahwa "kalau mau cari uang jangan jadi guru tetapi jadi pedagang saja" (DetikJateng, 2025). Meskipun konteks pernyataan tersebut kemungkinan dimaksudkan untuk meluruskan niat bahwa menjadi guru adalah sebuah pengabdian (panggilan jiwa) dan bukan semata untuk mencari kekayaan, namun di telinga publik khususnya para guru honorer dan guru dengan gaji minim pernyataan ini terdengar sangat tidak empatik. Pernyataan tersebut dianggap meremehkan perjuangan ekonomi para guru yang juga berhak atas kesejahteraan.

Kasus Menteri Agama ini menyoroti rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika komunikasi publik, terutama empati dan kejelasan pesan. Dalam komunikasi publik, pesan yang diterima (*message received*) oleh audiens jauh lebih penting daripada pesan yang dimaksudkan (*message intended*) oleh komunikator. Kegagalan dalam memilih kata yang tepat dan mempertimbangkan kondisi psikologis serta sosial audiens (para guru) mengakibatkan pesan tersebut menjadi *blunder* (Wahyuli, 2021). Ini menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup, tapi harus dibungkus dengan bahasa yang beretika dan penuh empati agar tidak mencederai perasaan publik (Amrihani et al., 2021).

Berdasarkan kompleksitas dan rentetan kasus tersebut, sebuah penelitian yang mendalam dari perspektif ilmu komunikasi menjadi sangat krusial. Sebagian besar diskusi publik yang ada saat ini cenderung reaktif dan hanya berfokus pada analisis kasus per kasus atau sekadar menyalahkan individu pejabat. Belum banyak kajian akademis di Indonesia yang mencoba menggali akar masalah ini secara holistik, yaitu dengan menempatkan etika komunikasi sebagai variabel sentral dan menganalisisnya melalui pendekatan

kualitatif yang mampu menangkap makna dan esensi dari fenomena tersebut. Di sinilah letak urgensi dari penelitian ini.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya menempatkan etika komunikasi publik sebagai seperangkat norma atau pedoman formal, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan melihat etika komunikasi sebagai praktik reflektif dan situasional yang dijalankan oleh pejabat publik dalam pengalaman nyata mereka. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) yang memungkinkan peneliti mengungkap makna pengalaman komunikasi dari sudut pandang aktor secara langsung. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyoroti “apa” yang disampaikan dalam komunikasi publik, tetapi juga “bagaimana” dan “mengapa” suatu pernyataan dapat menjadi kontroversial, termasuk ketegangan antara niat komunikator dan interpretasi publik.

Penelitian ini memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pilihan ini didasarkan pada keyakinan bahwa fenomena *blunder statement* tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan menghitung frekuensi kejadiannya (Amrihani et al., 2021). Fenomenologi memungkinkan peneliti untuk melampaui data permukaan dan menggali “makna” dari pengalaman komunikasi yang etis (atau ketiadaannya) bagi para pejabat publik dan dampaknya bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana esensi etika komunikasi publik seharusnya dimaknai dan diinternalisasi oleh pejabat agar dapat berfungsi sebagai “kompas moral” dalam setiap ucapan. Pendekatan ini relevan untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan mendalam, yang tidak dapat dicapai melalui metode kuantitatif (Creswell & Poth, 2021).

Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa fenomena blunder pernyataan tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan individu, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor institusional, dinamika media, serta konstruksi makna oleh masyarakat. Pencegahan pernyataan kontroversial memerlukan proses komunikasi yang terstruktur, meliputi verifikasi data, koordinasi internal, serta sensitivitas terhadap konteks sosial sebelum pernyataan disampaikan. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat bersifat ganda. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya khazanah studi komunikasi publik dan etika komunikasi di Indonesia, yang masih sangat relevan untuk terus dikembangkan. Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk merumuskan sebuah kerangka kerja atau model komunikasi publik yang berlandaskan etika bagi pejabat di Indonesia. Ini sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintahan demi memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat kesehatan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan masalah, tetapi juga untuk menjadi bagian dari solusi.

KERANGKA TEORI

Teori Etika Komunikasi

Teori Etika Komunikasi ditempatkan sebagai landasan utama, langkah selanjutnya adalah memetakan konsep-konsep dasar etika komunikasi yang akan diaplikasikan pada konteks pejabat publik. Etika komunikasi tidak hanya berbicara tentang pilihan kata atau teknik retorika semata, melainkan juga menuntut pertimbangan moral yang sistematis, seperti kejujuran, tanggung jawab, kehati-hatian, keadilan, dan sensitivitas kontekstual yang memandu setiap keputusan komunikasi (Sari, 2020).

Etika komunikasi dalam praktik dapat dibagi ke dalam beberapa komponen utama, yaitu kejujuran yang mencakup akurasi fakta dan keterbukaan terhadap koreksi, keterbukaan dan akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pernyataan, empati serta sensitivitas terhadap kondisi audiens, proporsionalitas dalam mempertimbangkan dampak, dan kepatuhan terhadap norma serta hukum. Komponen-komponen ini dapat dianalisis secara kualitatif melalui wawancara, analisis wacana, dan kajian dokumenter, dengan empati dan akuntabilitas menjadi aspek penting di era digital karena reaksi publik yang cepat (Khaidir et al., 2022). Sementara kegagalan pada salah satu aspek sering memicu blunder dan menjadi indikator penilaian apakah suatu pernyataan bersifat benar, proporsional, dan mendukung dialog (Fahirah et al., 2024).

Etika Komunikasi Pejabat Publik

Etika komunikasi pejabat publik menuntut keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pelayanan. Ujaran harus akurat, proporsional, berempati, dan selaras dengan kewajiban konstitusional menghormati martabat warga. Praktisnya, setiap pernyataan perlu memenuhi tiga tahap, yaitu penapisan substansi (cek data, konteks hukum, dampak kebijakan), penapisan bahasa (eliminasi diksi merendahkan, stereotip, dan insiniasi), serta penapisan publik (uji kejelasan, kemungkinan salah tafsir, rencana klarifikasi). Dalam *platform* digital, kewajiban ini diperkuat oleh kebutuhan dokumentasi jejak perubahan dan protokol ralat. Pemimpin beretika juga mengakui kesalahan secara terbuka, memperbaiki praktik, dan membuka dialog. Standar tersebut penting karena kredibilitas institusi bergantung pada *ethos* komunikator. Ketika etika dipatuhi, kepercayaan publik terpelihara, ketika diabaikan, reaksi negatif memperbesar risiko polarisasi, delegitimasi kebijakan, dan krisis kepercayaan yang sulit dipulihkan. Karena itu, pejabat wajib dilatih berkala, diawasi independen, dan diaudit komunikasi sebelum rilis publik (Bahri et al., 2023).

Pejabat publik tidak berbicara sebagai individu semata, ucapan mereka merepresentasikan institusi, kebijakan, dan harapan publik, oleh karenanya norma etika komunikasi yang berlaku pada pejabat harus lebih komprehensif

daripada norma individu biasa (Suhifatullah, 2019). Dalam konteks digital saat ini, etika pejabat publik perlu memperhatikan dua dimensi utama, yaitu:

- 1) Kewajiban institusional: keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan administrasi dan hukum.
- 2) Ketulusan relasional: empati, perhatian terhadap pihak yang terdampak, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan publik.

Konsep "*ethics of care*" (etika kepedulian) memperkaya perspektif ini, bukan hanya apakah pernyataan itu benar atau sesuai aturan, tetapi juga apakah pernyataan itu menunjukkan kepedulian terhadap publik yang rentan dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Seperti yang dinyatakan oleh Hou dan Johnston (2024), "*public communication must embody care as a moral orientation rather than a strategic choice*" (Hou & Johnston, 2024), sehingga pejabat publik perlu menjadikan kepedulian sebagai dasar etika komunikatif, bukan sekadar strategi citra.

Etika komunikasi pejabat publik pada level praktik memerlukan protokol operasional. Protokol tersebut mencakup prosedur verifikasi fakta sebelum berbicara, standar bahasa yang mempertimbangkan sensitivitas kelompok rentan, mekanisme review internal di kantor humas untuk pernyataan yang berpotensi sensitif, serta mekanisme akuntabilitas pasca-pernyataan seperti klarifikasi, koreksi, atau permintaan maaf bila diperlukan. Prosedur semacam ini diperlukan, tanpa panduan etika yang jelas, pejabat dan tim humas rawan melakukan kesalahan komunikasi yang mengancam reputasi (Wachid et al., 2024). Langkah-langkah ini digunakan menurunkan probabilitas *blunder* yang lahir dari reaksi impulsif, *framing* yang buruk, atau pemilihan diksi yang merendahkan.

Etika komunikasi pejabat publik perlu dipahami bukan sebagai hambatan birokrasi, melainkan sebagai kompetensi strategis yang menambah kredibilitas (*ethos*). Ketika pejabat mempraktikkan etika kepedulian, akuntabilitas, dan verifikasi pesan yang kuat, mereka membangun kepercayaan publik jangka panjang. Karena itu, pelatihan etika komunikasi, simulasi krisis berbasis empati, serta audit pesan berkala menjadi kebutuhan kelembagaan (Irhamdhika et al., 2025). Pendekatan multi-level "*enables communicators to integrate care ethics into organizational decision-making*" (Hou & Johnston, 2024), menjadikan etika komunikasi bagian dari tata kelola kelembagaan, bukan sekadar perilaku personal.

Level praktis-taktis menunjukkan bahwa studi empiris tentang respons pejabat setelah pernyataan keliru (*erroneous statements*) menemukan pola tertentu dalam upaya pemulihan citra. Alih-alih sering memilih strategi pengakuan penuh (*mortification*), pejabat cenderung menggunakan strategi yang mengurangi *offensiveness*, mengalihkan perhatian, atau mengambil tindakan korektif selektif, kecenderungan ini tampak di studi yang menerapkan *image restoration theory* pada kasus-kasus Indonesia pasca-COVID. Praktik pemulihan citra di Indonesia seringkali didorong oleh

pertimbangan reputasi politik dan budaya komunikasi lokal yang berimplikasi pada cara *blunder* ditangani dan seberapa cepat kepercayaan publik dapat dipulihkan (Andarini et al., 2023). Hal semacam ini akan memberikan dasar tidak hanya untuk menjelaskan fenomena *blunder*, tetapi juga merekomendasikan intervensi, seperti standar verifikasi, latihan etika kepedulian, dan protokol *image-restoration* yang kontekstual.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses pertukaran informasi terkait isu-isu politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Dalam konteks ini, komunikasi politik bukan lagi hal baru dalam kajian politik maupun ilmu komunikasi. Menurut Djuyandi (2017), komunikasi politik merupakan perpaduan dari lebih dari satu disiplin ilmu yang terintegrasi dalam suatu aktivitas, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi dan politik. Praktiknya kini banyak berlangsung melalui media sosial maupun media cetak (Nurhidayat & Garis, 2023). Tersedianya media sosial memegang peran yang sangat penting dalam sistem politik, dan keberhasilan komunikasi politik akan sangat memengaruhi stabilitas serta penguatan tatanan politik.

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan isu-isu politik, melibatkan para pelaku politik, serta berhubungan erat dengan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan kebijakan publik (Haris, 2022). Komunikasi pejabat publik menuntut keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pelayanan. Pernyataan harus akurat, empatik, dan menghormati martabat warga, melalui tiga tahap: penapisan substansi, bahasa, dan publik. Di era digital, diperlukan dokumentasi dan protokol ralat. Pejabat juga harus terbuka mengakui kesalahan dan menjaga dialog. Standar ini krusial karena kredibilitas institusi bergantung pada komunikasi, pelanggaran etika berisiko memicu polarisasi dan krisis kepercayaan. Oleh sebab itu, pelatihan, pengawasan, dan audit komunikasi perlu dilakukan secara berkala (Bahri et al., 2023). Pejabat publik tidak berbicara sebagai individu, melainkan mewakili institusi dan kebijakan, sehingga standar etikanya lebih tinggi dan komprehensif, termasuk dalam menghadapi tantangan komunikasi digital (Suhifatullah, 2019). Komunikasi politik memiliki empat tujuan utama, yaitu:

1. Membangun serta membentuk citra dan opini publik.
2. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik.
3. Memenangkan kontestasi pemilihan.
4. Memengaruhi kebijakan publik maupun kebijakan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang bertujuan memahami makna mendalam dari pengalaman

hidup (*lived experience*) para informan terkait fenomena komunikasi publik, khususnya pengalaman komunikatif pejabat di Kabupaten Wonogiri dalam memaknai etika komunikasi dan kaitannya dengan munculnya pernyataan kontroversial yang memicu reaksi masyarakat maupun media (Taufiq et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya menyoroti hasil komunikasi, tetapi juga proses mental, pertimbangan etis, serta interpretasi subjektif yang mendasarinya, sehingga memungkinkan penelusuran terhadap bagaimana informan memahami, merasakan, dan merefleksikan pengalaman komunikasinya (Santhi et al., 2025). Secara epistemologis, fenomenologi berakar pada pemikiran Edmund Husserl yang menekankan pemahaman fenomena sebagaimana dialami subjek, kemudian berkembang dalam fenomenologi interpretatif yang menekankan penggambaran esensi pengalaman berdasarkan narasi informan serta peran peneliti dalam menafsirkan pengalaman tersebut melalui refleksi analitis.

Penelitian ini mengumpulkan data dari fenomena *blunder statement* pejabat publik dalam satu tahun terakhir dengan sumber utama berupa narasi informan melalui wawancara dan observasi (Sarwi et al., 2022). Data diperoleh dari informan yang mengalami langsung fenomena etika komunikasi publik melalui wawancara mendalam untuk menggali persepsi, pengalaman, dan refleksi etis, serta observasi pada konteks komunikasi resmi guna menangkap interaksi yang tidak selalu terungkap secara verbal (Nindialisma et al., 2025). Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis, mencakup teks pernyataan resmi, siaran pers, unggahan media sosial, pedoman kehumasan, hingga pemberitaan media yang relevan dengan pernyataan kontroversial yang diteliti (Nurlikasari et al., 2021).

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh bersifat otentik dan mendalam (Palupi, 2020). Kriteria pemilihan informan adalah sebagai berikut:

1. pejabat publik yang telah menjabat minimal 1 tahun di Kabupaten Wonogiri
2. pejabat publik yang pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyampaian informasi ke publik
3. pejabat publik yang bersedia menjadi informan penelitian dan membuka akses untuk wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik lain untuk memperluas jangkauan informan, penelitian ini membuka kemungkinan penggunaan Snowball sampling. Teknik ini digunakan apabila informan awal merekomendasikan individu lain yang dianggap relevan dan memiliki pengalaman langsung terkait fenomena komunikasi publik yang dikaji (Lenaini et al., 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth phenomenological interview*), observasi, dan analisis dokumentasi (Wartika et al., 2023).

1. Wawancara Mendalam (*In-depth phenomenological interview*)

Teknik ini sejalan dengan penelitian fenomenologi oleh Smith et al., (2021), di mana wawancara digunakan untuk menggali makna pengalaman subjektif dan menelusuri struktur kesadaran informan. Fungsi melakukan wawancara mendalam untuk memahami:

- a. Bagaimana informan mengalami fenomena
- b. Bagaimana mereka menafsirkan etika komunikasi
- c. Bagaimana mereka memproses pengalaman situasi ketika pernyataan yang di umumkan menimbulkan kontroversi
- d. Bagaimana mereka memberi makna terhadap reaksi publik dan media

2. Observasi

Observasi dilakukan di lokasi-lokasi yang relevan, seperti kantor humas instansi, konferensi pers, atau pertemuan internal pejabat. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, kecuali diizinkan untuk partisipatif, untuk memahami bagaimana proses komunikasi berjalan di belakang panggung.

3. Analisis Dokumentasi

Adapun data dokumentasi yang diperlukan untuk observasi dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Pernyataan resmi pejabat dalam bentuk teks (pidato, siaran pers, media sosial)
- b. Protokol atau pedoman humas (SOP komunikasi)
- c. Catatan internal humas (apabila diperoleh)
- d. Materi media (artikel, liputan) terkait pernyataan kontroversial

Uji keabsahan data menggunakan konsep trustworthiness dari Lincoln dan Guba yang mencakup kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Stahl & King, 2020), sementara analisis data dilakukan dengan metode Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) yang dikembangkan oleh Smith, Flowers, dan Larkin untuk mengungkap dan menafsirkan makna pengalaman subjektif informan secara bertahap, interaktif, dan reflektif (Smith & Larkin, 2022). Langkah analisis dilakukan secara bertahap, interaktif, dan reflektif, berikut langkah-langkah analisisnya.

1. Membaca dan memahami keseluruhan data
2. Memberi catatan awal (*initial noting*) (Kelly et al., 2023)
3. Mengembangkan tema-tema awal
4. Menghubungkan tema menjadi struktur makna
5. Analisis antar-informan (*cross-case analysis*) (McInally & Gray-Brunton, 2021)
6. Menarik kesimpulan dan merumuskan esensi fenomena (Rajasinghe et al., 2024)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat informan dengan latar belakang komunikasi publik yang berbeda, ditemukan adanya pola pengalaman yang relatif seragam dalam memaknai dan menerapkan etika

komunikasi publik. Dengan pendekatan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), terungkap bahwa etika komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi sebagai praktik reflektif yang dijalankan secara situasional untuk mencegah munculnya pernyataan kontroversial pejabat publik. Secara umum, informan memandang bahwa komunikasi publik harus melalui proses yang terencana dan penuh pertimbangan. Pernyataan tidak disampaikan secara spontan, melainkan melalui verifikasi data, koordinasi internal, serta penyesuaian dengan konteks sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa setiap pesan yang disampaikan memiliki potensi dampak luas, sehingga membutuhkan kehati-hatian baik dari sisi isi maupun cara penyampaiannya.

Tabel 1. Data Hasil Analisis Teori dengan Temuan

Aspek	Teori	Temuan Praktik
Kejujuran	Etika komunikasi menekankan penyampaian informasi yang benar dan tidak menyesatkan	Informan berupaya menyampaikan informasi sesuai fakta
Transparansi	Komunikasi publik menuntut keterbukaan informasi kepada masyarakat	Dilakukan, namun masih mempertimbangkan kondisi tertentu
Akuntabilitas	Setiap komunikasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan publik	Terdapat kesadaran untuk bertanggung jawab atas pernyataan
Kesantunan	Etika komunikasi mengatur penggunaan bahasa yang tidak menyinggung	Umumnya diterapkan dalam praktik komunikasi
Tanggung jawab sosial	Komunikasi publik harus mempertimbangkan dampak sosial	Mulai diperhatikan, terutama pada isu sensitif
Kredibilitas (<i>Ethos</i>)	Retorika Aristoteles menekankan kepercayaan sebagai kunci komunikasi	Sudah dibangun, namun masih berpotensi terganggu akibat kesalahan komunikasi

Sumber: Data Olahan Peneliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh pejabat di Kabupaten Wonogiri merupakan praktik yang tidak sederhana, melainkan melibatkan proses reflektif, strategis, dan penuh pertimbangan etis. Berdasarkan wawancara dengan empat informan yang berasal dari unsur eksekutif, humas, dan legislatif, ditemukan bahwa komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial, membangun kepercayaan publik, serta mengelola persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Dari sisi eksekutif, komunikasi dipahami sebagai aktivitas yang harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis pertimbangan yang matang. Setiap pernyataan publik tidak dapat disampaikan secara spontan, melainkan harus

melalui proses penilaian terhadap dampak yang mungkin timbul di masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan dari informan humas yang menegaskan bahwa dalam praktiknya, komunikasi publik selalu melalui proses verifikasi informasi sebelum disampaikan.

Sebagaimana disampaikan oleh informan MSK yang menyatakan, “tidak langsung spontan, kita cek dulu sumber datanya dari mana supaya bisa dipertanggungjawabkan” (W/MSK, 23/02/2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akurasi informasi menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya kesalahan komunikasi atau blunder. Kecepatan dalam merespons menjadi faktor penting dalam mengelola komunikasi publik, terutama ketika terjadi kesalahan atau potensi kontroversi. Informan humas menekankan bahwa keterlambatan dalam klarifikasi dapat memperburuk situasi, sehingga diperlukan respons yang cepat dan tepat. Dalam konteks ini, blunder pernyataan tidak hanya disebabkan oleh kesalahan awal, tetapi juga oleh kegagalan dalam mengelola respons setelah pernyataan tersebut disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik bersifat dinamis dan berkelanjutan, tidak berhenti pada tahap penyampaian pesan semata.

Dari perspektif legislatif, komunikasi publik memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan dengan kepentingan politik dan representasi kelembagaan. Setiap pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPRD tidak hanya mencerminkan individu, tetapi juga institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan untuk melakukan koordinasi internal sebelum menyampaikan pernyataan ke publik guna menghindari perbedaan persepsi. Selain itu, informan juga mengakui bahwa seringkali pernyataan yang disampaikan dapat mengalami distorsi makna ketika diterima oleh masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh pernyataan hasil wawancara dari informan ETH, “pernyataan yang sebenarnya biasa saja, tapi jadi ramai karena ditafsirkan berbeda” (W/ETH, 18/02/2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa blunder tidak selalu berasal dari kesalahan objektif, tetapi dapat muncul akibat perbedaan interpretasi antara komunikator dan audiens. Pendalaman lebih lanjut melalui wawancara dengan anggota DPRD menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab moral dalam komunikasi publik. Informan menekankan bahwa setiap pernyataan harus berbasis data yang valid serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, terdapat sikap terbuka dalam mengakui kesalahan sebagai bagian dari etika komunikasi.

Hal ini didukung dengan pernyataan oleh informan APU yang menyatakan, “saya juga tidak segan untuk meminta maaf kepada publik” (W/APU, 07/02/2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Sikap ini memperlihatkan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi moral yang kuat. Dalam perspektif *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), pengalaman para informan menunjukkan bahwa komunikasi publik merupakan proses pembentukan makna yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks sosial, dinamika politik, serta karakteristik audiens. Makna dari suatu pernyataan tidak sepenuhnya ditentukan oleh niat komunikator, tetapi juga oleh bagaimana pesan tersebut ditafsirkan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara niat dan persepsi, yang menjadi salah satu sumber utama terjadinya blunder pernyataan pejabat publik.

Di era digital, tantangan komunikasi publik menjadi semakin kompleks dengan adanya kecepatan penyebaran informasi dan potensi distorsi pesan. Informasi yang belum lengkap dapat dengan cepat menjadi viral dan memicu reaksi publik yang luas. Kondisi ini menuntut pejabat publik untuk tidak hanya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan interpretasi yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, komunikasi publik tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menjadi proses interaktif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk media, tokoh masyarakat, dan publik itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut dibangun melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan, transparansi dalam penyampaian informasi, serta keterbukaan terhadap kritik. Dalam hal ini, klarifikasi tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga sebagai upaya untuk merekonstruksi makna dan memulihkan kepercayaan publik yang mungkin terganggu akibat pernyataan yang kontroversial.

KESIMPULAN

Fenomena blunder pernyataan pejabat publik merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai faktor, mulai dari individu, institusi, media, hingga masyarakat. Blunder tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai konsekuensi dari dinamika komunikasi publik yang sarat dengan interpretasi dan kepentingan. Oleh karena itu, pencegahan blunder memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup peningkatan kompetensi komunikasi, penguatan etika, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Komunikasi publik pejabat dapat dipahami sebagai praktik reflektif dan strategis yang bertujuan untuk mengelola makna serta menjaga kepercayaan publik di tengah kompleksitas kehidupan sosial. Pendekatan fenomenologi IPA dalam penelitian ini berhasil mengungkap pengalaman

subjektif para pejabat dalam menghadapi tantangan komunikasi, sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh apa yang disampaikan, tetapi juga oleh bagaimana pesan tersebut dipahami dan dimaknai oleh masyarakat.

IMPLIKASI PRAKTIS

Bagi Pejabat Publik

1. Penerapan prinsip verifikasi sebelum berbicara, dengan memastikan bahwa setiap pernyataan berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penggunaan bahasa yang jelas, tidak ambigu, dan tidak menyinggung kelompok tertentu, guna menghindari multitafsir di masyarakat.
3. Kemampuan reflektif dalam mempertimbangkan dampak sosial pernyataan, sehingga komunikasi tidak dilakukan secara spontan.
4. Keterbukaan dalam mengakui kesalahan dan menyampaikan klarifikasi, sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya menjaga kepercayaan publik.

Bagi Humas Pemerintah

1. Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi publik, termasuk tahapan verifikasi, koordinasi internal, dan persetujuan pesan sebelum dipublikasikan.
2. Pelaksanaan audit komunikasi secara berkala, untuk mengevaluasi potensi risiko pernyataan yang dapat menimbulkan kontroversi.
3. Penguatan sistem respons cepat (*rapid response*) dalam menangani isu agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Bagi Lembaga Komunikasi Publik

1. Mengintegrasikan etika komunikasi dalam tata kelola kelembagaan, sehingga menjadi bagian dari budaya organisasi.
2. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan terkait etika komunikasi dan literasi digital, mengingat kompleksitas komunikasi di era media sosial.
3. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi komunikasi publik, termasuk analisis respons masyarakat terhadap pernyataan pejabat.
4. Mengembangkan protokol komunikasi krisis dan image restoration.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrihani, H. A., Komunikasi, D., & Airlangga, U. (2021). *Retorika Deliberative: Komunikasi Marah Marah Pejabat di Ruang Publik*. 3(2), 124–131.
- Andarini, R. S., Pratiwi, M., Setiyowati, R., & Santoso, A. D. (2023). Indonesian public officials after erroneous statements about COVID-19: An

- application of image restoration theory. *Frontiers in Political Science*, 4, 1062237.
- Arif, M. (2025, August). Sahroni Balas Kritik Desak Bubarkan DPR: Mental Orang Tolol Sedunia. *CCN Indonesia*, Politik.
- Bahri, F. F., Maharani, N., Safitri, I., Ramayati, R., Auliza, S., & Ritonga, N. H. (2023). Tanggung jawab etis komunikasi berdasarkan etika dalam berkomunikasi di era globalisasi dan industri. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 1175–1185.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- DetikJateng. (2025, August). *Kebijakan Bupati Pati Sudewo yang Berujung Didemo-Didesak Lengser*.
- Ernasari, L., & Hadiati, N. A. (2024). *RUNTUHNYA ETIKA KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL (Analisis Wacana Pada Komentar Akun Twitter Jerome Polin)*. 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.29244/jstrsv.2.1.1-9>
- Fahirah, R., Angin, I. P., Sosial, F. I., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). New Media: Analisis Konten Etika Komunikasi Publik Humas Pemerintahan pada Akun X @Kemkominfo. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1477–1486. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1564>
- Febriandy, R. K. (2024). *Kebocoran Data PDNS Analisis Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah Berdasarkan Image Repair Theory*. 12(2), 331–348.
- Haris, A. (2022). Strategi Komunikasi Politik Interaktif Di Era Virtualitas. *Jurnal Publik Reform*, 9(1), 34–44.
- Hastrida, A., & Hendriyani. (2023). Pengaruh Komunikasi Dialogis Terhadap Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 27(2), 141–160. <https://doi.org/10.17933/jskm.2023.5144>
- Hou, J. Z., & Johnston, J. (2024). Putting ethics of care into public relations: Toward a multi-level agency model. *Public Relations Review*, 50(5), 102495.
- Irhamdhika, G., El Hidayah, N. I., Ariska, Y., Ningtyas, D. A., & Sari, A. (2025). Krisis Kepercayaan Publik: Fenomena# Kaburajadulu Dan Peran Humas Pemerintah Dalam Merespons Cancel Culture. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 6(1), 7–15.
- Jateng, D. (2025, September). *Menag: Kalau Mau Cari Uang Jangan Jadi Guru, Jadi Pedagang*.
- Kelly, N. J., Hallam, J., & Bignell, S. (2023). Using interpretative phenomenological analysis to gain a qualitative understanding of presence in virtual reality. *Virtual Reality*, 27(2), 1173–1185.

- Khaidir, S. N. F., Malik, I., & Akbar, M. R. (2022). Ethics of Government Public Communication in Social Media for COVID-19 Management in Makassar City. *Journal of Government and Political Issues*, 2(3), 156–166.
- Kusnadi, D., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2023). *Strategi Manajemen Komunikasi Dalam Menghadapi Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Rendahnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Pemerintah Studi Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Abdul Manaf Kota Jambi*. 2(4), 222–229.
- Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., & Takdir, M. (2024). *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital*. 5(1), 23–32.
- Lenaini, I., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Martini, R., & Elsitra, G. N. (2022). *Kajian Kritis Komunikasi Krisis : Belajar dari Kerumitan Komunikasi Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19*. 13(1), 149–166. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.149-166>
- McInally, W., & Gray-Brunton, C. (2021). Research made simple: Using multiperspective interpretative phenomenological analysis to explore healthcare phenomena. *Evidence-Based Nursing*, 24(3), 71–73.
- Nindialisma, T. C., Sadtyadi, H., & Ngadat, N. (2025). Pengaruh Metode Role Playing Terhadap Keterampilan Kerjasama Dan Komunikasi Siswa Dalam Pembelajaran Ips Berbasis Kurikulum Merdeka Di Kelas Vb Sdn 7 Wonogiri. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 590–600.
- Nugraha, A. R., Fatma Sjoraida, D., & Novianti, E. (2022). Eksplorasi Opini Publik di Twitter Mengenai Kesejahteraan Sosial pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Profesi Humas*, 6(2), 286–310.
- Nurhidayat, I., & Garis, R. R. (2023). Trend komunikasi politik di media sosial. *Jurnal Lanskap Politik*, 1(2), 1–24.
- Nurlikasari, F., Hatmono, P. D., & Singamurti, M. M. (2021). Pengembangan Modul Berbasis Problem Based Learning Pada Materi Hukum Tertib Kosmis Unuk Siswa Tingkat SMA. *Pendidikan Dasar Dan Manajemen Pendidikan*, 2(1), 67–82.
- Oktari, Y., Mindarti, L. I., Brawijaya, U., & Timur, J. (2023). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 9(1), 11–20.
- Palupi, P. (2020). Studi fenomenologi: Pengalaman primipara saat mengalami depresi postpartum. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)*, 4(2), 81–90.

- Praditia, M. D. (2025, October). *Pemkab Wonogiri bakal Tarik Pajak 10% UMKM Mamin Beromzet Minimal Rp5 Juta*.
- Rahmanto, A. N. (2022). *Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya*. 20(1), 88–100.
- Rajasinghe, D., Garvey, B., Burt, S., Barosa-Pereira, A., & Clutterbuck, D. (2024). Innovative interpretative phenomenological analysis (IPA) approach in a coaching research project: implications for future qualitative coaching research and beyond. *Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice*, 17(2), 301–318.
- Rosyalita, D. (2012). *Tempora: Journal of Management ISSN: xxxx-xxxx 7 Peran Humas dalam Membangun Kepercayaan Publik terhadap Kebijakan Pemerintah*. 7–11.
- Santhi, P. A., Sadtyadi, H., & Sudarto, S. (2025). Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Kelas Iiia Pada Mata Pelajaran Pelajaran Pendidikan Pancasila Di Sd. *Social. SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 580–589.
- Sari, A. F. (2020). Etika komunikasi: Menanamkan pemahaman etika komunikasi kepada mahasiswa. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 127–135.
- Sarwi, S., Paramita, S., & Sudarto, S. (2022). Strategi penyuluh Agama Buddha dalam mempertahankan keberlangsungan generasi muda Buddhis. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 8(1), 29–42.
- Smith, J. A., & Larkin, M. (2022). *Interpretative Phenomenological Analysis*. SAGE Publications.
- Smith, J. A., Larkin, M., & Flowers, P. (2021). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*.
- Stahl, N. A., & King, J. R. (2020). Expanding approaches for research: Understanding and using trustworthiness in qualitative research. *Journal of Developmental Education*, 44(1), 26–28.
- Suhifatullah, M. I. (2019). Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komunikasi Etis Aparatur Sipil Negara. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(2), 2527–2685.
- Taufiq, I., Pithaloka, D., & Rahmadani, B. (2023). Studi Fenomenologi Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Daerah. *Medium*, 11(2), 191–206.
- Wachid, I. B., Wulandari, M. P., & Nasution, Z. (2024). Navigating ethical challenges in Indonesian digital public relations practices. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 10(2), 267–282.
- Wahyuli, Y. H. (2021). *Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia Public Administration Ethics in The Administration*

Of Governance in Indonesia. 16, 182–189.

Wartika, I. W. A., Pratiknjo, M. H., & Waleleng, G. (2023). Government Communication Strategies in Publicizing Policies, Programs, Activities and Regional Development Achievements in the Digital Era (Case Study in The Leadership Administration Bureau of The Regional Secretariat of The Northern Sulawesi Province): . *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(2), 275–289.

Wiratama, P. (2022). *Etika Penggunaan Media Sosial Pemerintah dalam Konteks Pelayanan Publik. 7(7).*

